



RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sragen tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen atas dasar usulan dan program dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari berbagai pihak. Rencana kerja ini merupakan tahun ke lima dari pelaksanaan Renstra 2021-2026.

Rencana kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun anggaran 2025 serta untuk mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Instansi maupun pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2025, serta sebagai bahan acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya. Terima Kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN



dr. FINURIL HIDAYATI, M.P.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19750414 200501 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	5
1.4. Maksud dan Tujuan	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sragen	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen	26
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sragen	38
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	49
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN	62
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen	63
3.3. Strategi dan Kebijakan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN	67
4.1. Rencana Kerja.....	67
4.2. Dana Indikatif.....	69
BAB V PENUTUP	79
5.1. Catatan Penting.....	79
5.2. Kaidah Pelaksanaan	79
5.3. Rencana Tindak Lanjut	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	17
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sragen	26
Tabel 2.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis	36
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025.....	51
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sragen	61
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota	8
Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran	9
Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	10

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Menurut Alder (1999) dalam Rustiadi (2008) menyatakan bahwa: “Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya”.

Manfaat perencanaan bagi organisasi antara lain sebagai berikut.

1. Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
2. Dapat mengatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.

Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sragen satu tahun mendatang dengan indikator kinerja, kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sragen khususnya pada tahun Renja terkait, dana indikatif beserta sumbernya serta memuat prakiraan maju.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan suasana keamanan dan kenyamanan yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-

prioritas, sasaran program yang mendukung Misi jangka menengah **“Menangani Kemiskinan, memperluas kesempatan kerja”** sebagaimana dimaksud di dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Sebagai dokumen resmi, Renja mempunyai kedudukan yang strategis, menjembatani antara perencanaan pada PD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja PD disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD untuk penyusunan APBD Kabupaten, dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD provinsi dan APBN, sekaligus untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sragen adalah semakin berkurangnya populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berbasis masyarakat, melalui pelayanan kesejahteraan sosial yakni Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penanganan Fakir Miskin. Berangkat dari komitmen diatas, maka program kegiatan harus disusun dalam suatu musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan stakeholder dan masyarakat, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan terukur dengan baik.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagai berikut :

1.2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 05 Seri E Nomor 04);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor : 19 Tahun 2024 , tanggal 21 Juni 2024 tentang RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

a. Pengertian Rencana Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun;
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya pemerintah daerah mewajibkan setiap perangkat daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD, ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen resmi, Renja mempunyai kedudukan yang strategis, menjembatani antara perencanaan pada PD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja PD disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD untuk penyusunan APBD Kabupaten, dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD provinsi dan APBN, sekaligus untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang bersifat tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen, berupa penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut sebagai Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen

b. Proses Penyusunan Rencana Kerja

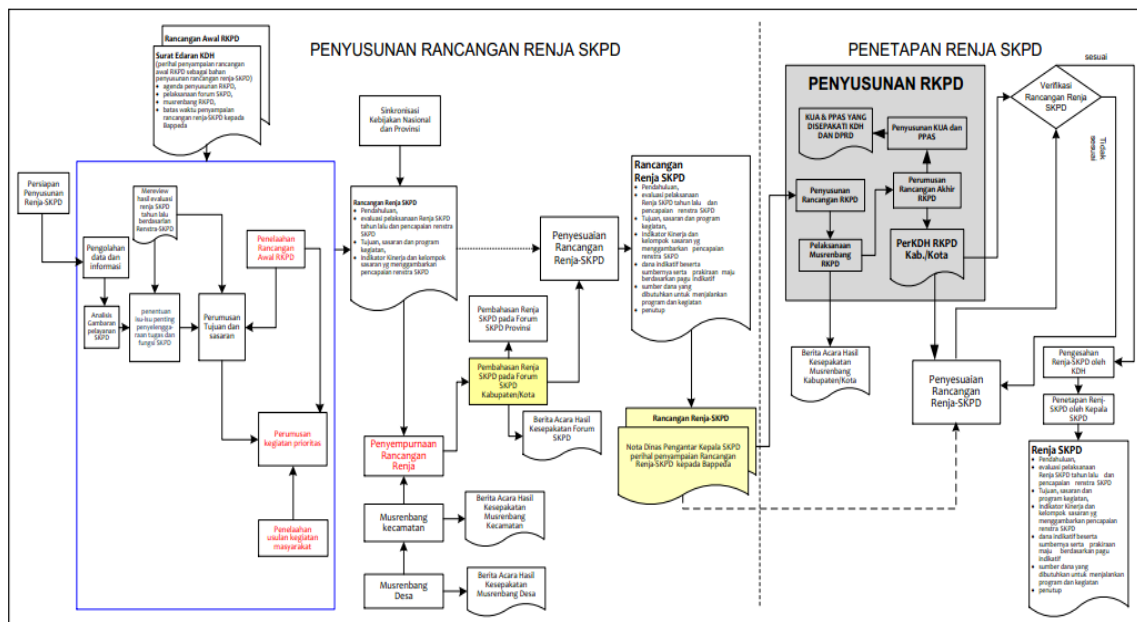
Proses penyusunan rencana kerja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, karena itu penyusunan rancangan Renja perangkat daerah dapat dikerjakan secara bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah pada tahun-tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (PD).

Tahap penetapan rancangan akhir Renja PD dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya kepala PD menetapkannya untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun berkenaan.

Prinsip Penyusunan Renja PD :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memperhatikan nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Adapun alur rancangan Renja PD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota

Dalam penyusunan Renja melalui tahap-tahap yang harus dilakukan

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Rencana Kerja
- Penyusunan agenda kerja Tim Rencana Kerja
- Pengumpulan data dan informasi.

b. Pengolahan Data dan Informasi

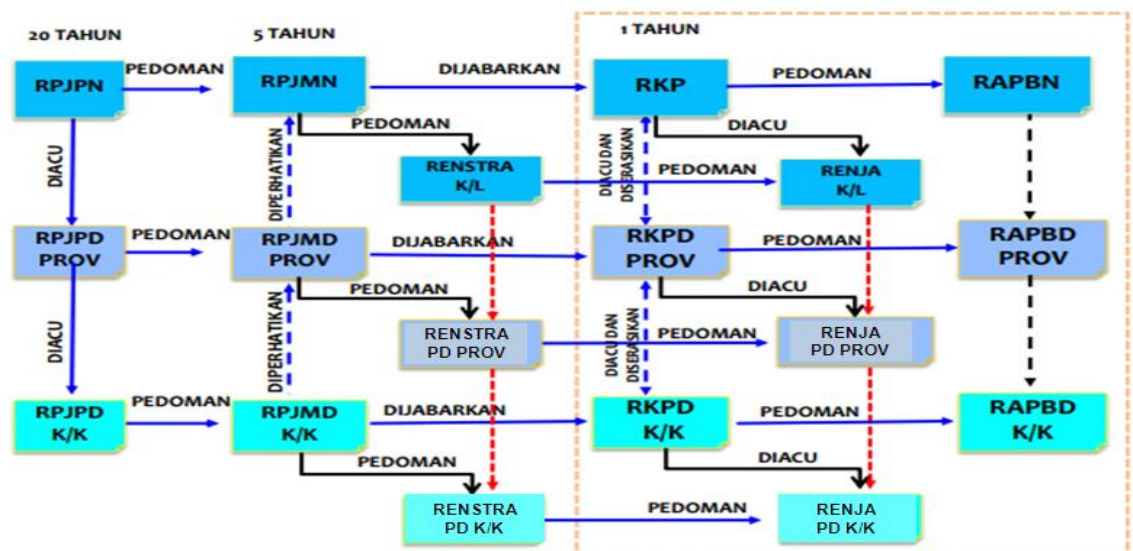
Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi Pembahasan Tim dan pihak-pihak terkait dalam setiap tahapan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Rencana Kerja

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan PD
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran.
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

mendatang dengan indikator kinerja, kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sragen, khususnya pada tahun Renja terkait, dana indikatif beserta sumbernya, serta memuat prakiraan maju. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen menyusun rencana kerja tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sragen.

Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari rencana strategis lima tahunan. Rencana kerja dan rencana strategis merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan, adalah sebuah proses sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan antara satu dengan lainnya. Mengenai keterkaitan antar dokumen perencanaan, dapat di lihat pada bagan berikut :



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah dalam rangka penyediaan untuk penyesuaian Rencana Kerja 2025 bagi Dinas Sosial Kabupaten Sragen dengan tujuan:

1. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.
2. Pencapaian target Renja Dinas Sosial Tahun 2025 dapat lebih terukur dan lebih optimal
3. Pemanfaatan sumber daya dan sumber dana lebih dioptimalkan sesuai dengan prioritas Renja yang telah disepakati

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sragen
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

- 3.1. Telah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen
- 3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

Berisi tentang program beserta indikator keberhasilan program, serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan

BAB V PENUTUP

Berisi catatan yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk Meningkatkan taraf Kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di prioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Alat Biometrik sangat membantu proses Rujukan dan Reunifikasi bagi penerima manfaat;
2. Mengadakan Verifikasi dan validasi Data;
3. Komitmen kelembagaan tingkat daerah sampai desa/kelurahan;
4. Adanya regulasi yang mendukung baik Perda dan Perbup.;
5. Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :
 - a. PKH (Program Keluarga Harapan) sebanyak 33.969 KPM, Bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara transfer langsung oleh Bank Himbara ke Rekening masing-masing KPM. Proses pencairan dilakukan di E-Warong/ATM dan diambil secara Tunai dan melalui kantor pos.
 - b. Bantuan Sosial yang diperuntukkan untuk anak-anak dengan status Yatim, Piatu atau Yatim Piatu (YAPI) di salurkan sebanyak 516 Orang untuk program atensi YAPI tahun 2023 tranfer melalui rekening masing-masing penerima manfaat.

- c. Bantuan Sosial Rumah Sejahtera Terpadu (RST) sebanyak 1 orang untuk memenuhi kebutuhan perumahan fakir miskin dimana sesuai Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin juga menyebutkan salah satu penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk penyediaan akses pelayanan perumahan.
- d. Permakanan Lansia sebanyak 657 Orang, di mana Permakanan ini diantar langsung ke penerima dengan menu yang memenuhi gizi para lansia, kebutuhan nutrisi makanan 2x sehari dalam 1 kali pengantaran yang terdiri dari nasi/jenis makanan pokok lainnya, lauk pauk (hewani/nabati), sayur, buah potong, dan air mineral.
- e. Bantuan usaha ekonomi produktif bagi KPM usia produktif yang memiliki usaha untuk Pahlawan Nusantara (Pena) Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) sebanyak 109 orang dengan memberikan bantuan permodalan usaha tidak dalam bentuk uang tetapi berupa barang atau sarana usaha, harapannya penerima manfaat supaya merasa dirinya mandiri secara ekonomi, agar bisa mengalihkan jatah bansosnya kepada masyarakat lain yang benar-benar membutuhkan
- f. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebanyak 64.481 KPM, Bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara transfer langsung oleh Bank Himbara ke Rekening masing-masing KPM dan terakhir melalui PT. POS selama 3 bulan dalam bentuk uang tunai Rp. 200.000/bulan.
- g. PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebanyak 394.246 KPM dalam bentuk pelayanan kesehatan.
- h. KJS (Kartu Jateng Sejahtera) Sebanyak 273 KPM
- i. Hibah dari Negara Australia melalui APBD Provinsi untuk 18 KUBE di 5 Kecamatan yaitu kecamatan Gemolong, Plupuh, Tanon, Sumberlawang, Kalijambe Rp. 352.750.000
- j. Bantuan Atensi bagi penyandang disabilitas sebanyak 25 Unit berupa kursi roda.

- k. Bantuan langsung Tunai (BLT) bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau melalui dana DBHCHT sebanyak 286 Orang Masing-masing Rp. 300.000 di anggaran penetapan 4 bulan dan di anggaran perubahan 1 bulan.

Sedangkan Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Regulasi dari Kementrian Sosial yang sering berubah-ubah;
2. Aksesibilitas data DTKS dan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) di berikan kepada Penerima Bantuan Sosial tidak melalui Dinas Sosial Kabupaten Sragen, melainkan melalui Bank Himbara dan PT POS;
3. Tingginya jumlah PPKS di Kabupaten Sragen sebanyak 86.289 Orang tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
4. Penduduk miskin dengan kondisi keterlantaran dan tidak potensial;
5. Karakteristik masyarakat miskin yang cenderung mempunyai sikap mental pasrah, merasa nyaman dengan bantuan sosial yang selama ini diterima;
6. Ketegasan dari pengambil kebijakan terutama di tingkat desa yang merasa enggan mengeluarkan warga dari data kemiskinan dengan berbagai faktor seperti kedekatan, unsur politis dan lainnya;
7. Masih terjadinya ketidaktepatan sasaran beberapa program perlindungan dan bantuan sosial berdasarkan sumberdata Kemensos melalui SIKS-NG
8. Syarat bantuan sosial adalah masyarakat miskin yang masuk DTKS, sedangkan kebanyakan masyarakat belum tahu aplikasi SIKS-NG.

Untuk mengatasi hal tersebut untuk mencapai sasaran kinerja tahun yang akan datang ditempuh strategis sebagai berikut :

1. Dalam hal penanganan PGOT Dinas Sosial Kabupaten Sragen hanya menangani pergelandangannya namun untuk kesehatan jiwa menjadi kewenangan Dinas Kesehatan sedang mengamuk menjadi kewenangan trantib atau polsek setempat. Sehingga masih dibutuhkannya pemahaman antar OPD untuk hal tersebut;

2. Untuk gelandangan sakit menjadi kewenangan dinas kesehatan hal ini RSUD, Dinas Sosial memberikan jaminan pembebasan jaminan kesehatan dengan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
3. Meningkatnya jumlah penerimaan anak jalanan di rumah singgah sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Timur dan tidak sedikit anak-anak Sragen yang ikut terjaring mengingat Sragen wilayah perbatasan sehingga akses pengaruh lingkungan terhadap anak jalanan semakin besar
4. Banyaknya permasalahan sosial anak termasuk ABH, akan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual anak dengan HIV/Aids, anak korban kekerasan fisik, mental dan anak dalam situasi rentan yang perlu penanganan dan pendampingan, serta memerlukan rumah aman baik untuk korban maupun pelaku anak sedangkan di Kabupaten Sragen belum mempunyai rumah aman
5. Penyandang cacat fisik sejumlah 7.700 jiwa, untuk lebih diberikan asistensi agar produktif
6. Perlunya dilakukan evaluasi kegiatan setiap bulan untuk pencapaian target triwulan sesuai dengan yang direncanakan
7. Verval data kemiskinan secara terus menerus;

Isu Dinas Sosial Kabupaten Sragen cenderung menghadapi berbagai masalah Sosial dengan berbagai ragam variabel yang mempengaruhi, sehingga ruang lingkup kajian di bidang sosial semakin berkembang. Secara umum kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagai pelayan masyarakat di daerah, sangat dipengaruhi oleh SDM Dinas Sosial Kabupaten Sragen dan dukungan anggaran.

Tingkat capaian kinerja yang bersifat rutin relative menunjukkan kinerja yang cukup baik diukur dari tingkat *out come / output* program dan kegiatan diantara 90% – 100%. Dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen tahun 2023 tersebut diatas sebagaimana tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut .

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]	100	100	100	100	100	100	100	100
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</i>	24	0	6	6	100	7	7	100
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	0	2	2	100	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	0	0	0	0	1	1	100
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	0	4	4	100	4	4	100
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah [Laporan]</i>	60	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang]	170	34	31	31	100	31	31	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah [Bulan]	60	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	60	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [paket]	60	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	60	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	60	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	60	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	4	2	0	0	0	0	0	100
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	136	2	4	4	100	80	80	100
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	0	0	0	0	62	62	100
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan [unit]	28	2	4	4	100	18	18	100
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah [Laporan]	60	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Bulan]	60	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Bulan]	60	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Bulan]	60	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang [Laporan]	60	12	12	12	100	12	12	100
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	105	21	21	21	100	21	21	100
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	6	1	2	2	100	1	1	100
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif secara individu, keluarga dan lembaga [%]	100	100	100	100	100	100	100	100
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	500	100	0	0	0	1	1	100
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau	5	100	0	0	0	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Barang								
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS (TKSK,Karang Taruna ,PSM, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tagana, dll) yang mengikuti Diklat. [Orang]	651	240	127	127	100	159	159	100
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan [Orang]	200	90	50	50	100	50	50	100
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota [orang]	100	20	20	20	100	20	20	100
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	110	0	30	30	100	30	30	100
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	61	30	7	7	100	7	7	100
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota [Sertifikat]	180	100	20	20	100	20	20	100
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan [%]	100	100	100	100	100	100	100	100
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik	Jumlah Korban Tindak Kekerasan(KTK) dan Pekerja Migran (PM) bermasalah yang	250	30	50	47	100	25	25	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	di tangani [Orang]								
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	250	30	50	47	100	25	25	100
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti [%]	100	100	100	100	100	100	100	100
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang, Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Jumlah [Orang]	5.205	1003	1476	2148	143	1222	1222	100
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota [orang]	500	214	100	226	226	100	100	100
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota [orang]	500	214	100	226	226	100	100	100
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	0	0	0	0	25	25	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota [orang]	880	277	117	229	195	65	65	100
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	425	0	400	668	167	200	200	100
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	500	100	100	100	100	100	100	100
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	585	25	185	208	112	162	162	100
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota [orang]	1.345	192	353	350	99	275	275	100
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota [orang]	325	30	0	0	0	75	75	100
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota [orang]	570	254	113	141	124	120	120	100
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti [Orang]	3.814	150	750	850	113	660	660	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Sosial									
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota [unit]	75	25	25	25	100	25	25	100
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	3.725	125	725	825	113	625	625	100
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	50	0	0	0	0	10	10	100
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial [%]	100	100	100	100	100	100	100	100
1.06.05.202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Bantuan sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), RTLH, Fakir Miskin, Santunan Duka Cita yang masuk DTKS dan jumlah Operator desa/kelurahan yang mengikuti Verifikasi dan validasi data Fakir Miskin, Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai bagi Fakir Miskin, Jumlah SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Jumlah Survei Saraswati, jampersal, RTLH, beasiswa bagi Masyarakat Miskin (UPT-PK), Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu, Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok	14.476	4098	4088	5303	129	4314	4314	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		[Orang]								
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota [Keluarga]	12.548	2414	2131	2976	139	1783	1783	100
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	2.198	1696	2101	2101	99,3	2431	2431	100
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2223	0	226	226	100	100	100	100
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan bencana sosial yang mendapatkan pelayanan [%]	100	100	100	100	100	100	100	100
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	40	48	120	240	240	100
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	180	0	0	0	0	50	50	100
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota [Orang]	200	25	40	48	120	40	40	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	600	0	0	0	0	150	150	100
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tagana yang mengikuti kegiatan Evakuasi Bencana Alam dan Sosial dan Koordinasi bencana alam dan sosial [Orang]	160	30	30	30	100	30	30	100
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Evakuasi dan koordinasi bencana alam dan sosial [Orang]	160	30	30	30	100	30	30	100
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola (Dirawat) [%]	100	100	100	100	100	100	100	100
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam terpenuhinya pemeliharaan TMP yang terawat [Makam]	1	1	1	1	100	1	1	100
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota [Makam]	1	1	1	1	100	1	1	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Analisis kinerja pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Sragen bisa di lihat dari dibawah ini Tabel 2.2 sebagai berikut

:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sragen

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi				Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	
					target	target	target	target	target		target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti											
			<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Lansia terlantar,anak terlantar, bermasalah dengan hukum, berkebutuhan khusus), Penyandang Disabilitas, tuna sosial, PGOT) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti</i>											
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	25	50	50	0	25	25	25		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	100	0	100	100	100	0	100	100		
			Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25	185	25	175	175	185	25	150	150		

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis	
					2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025		2026
					target	target	target	target	target		target	target	target		target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	50	40	40	40	50	40	50	50		
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	20	50	50	50	20	50	50	50		
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti											
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	475	525	525	525	475	25	425	425		
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0	0	50	50	50	0	50	50	50		
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti											
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti											

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5	10	10	15	5	10	10	10	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	300	75	75	75	300	75	75	75	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	0	25	25	25	0	25	25	25	
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5	20	20	25	5	10	20	20	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti										
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	10	25	25	0	0	25	25	
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti										

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis	
					2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025		2026
					target	target	target	target	target		target	target	target		target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Lansia terlantar,anak terlantar, bermasalah dengan hukum, berkebutuhan khusus), Penyandang Disabilitas, tuna sosial, PGOT) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti											
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	160	195	175	200	225	195	175	175	175		
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5	10	10	15	5	10	10	10		
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	0	25	25	25	0	25	10	10		
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5	20	20	25	5	10	10	10		
4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti											

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis	
					2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025		2026
					target	target	target	target	target		target	target	target		target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Lansia terlantar,anak terlantar, bermasalah dengan hukum, berkebutuhan khusus), Penyandang Disabilitas, tuna sosial, PGOT) yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti											
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	67	50	50	50	67	50	50	50		
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	0	50	50	50	0	50	50	50		
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	108	100	100	100	108	100	100	100		

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	83	50	50	50	83	50	50	50	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti										
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	0	25	0	0	0	25	0	0	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	50	50	0	50	50	50	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase (%)Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan										
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase (%) Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang ditangani										
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	100	100	100	0	50	50	50	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	100	100	100	40	40	40	40	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	150	150	150	0	150	150	150	

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar SPM urusan sosial antara lain :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/kota

Target pencapaian SPM urusan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu 100% setiap tahunnya

Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala yang terjadi dalam Penerapan SPM Urusan Sosial antara lain :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti tercapai 100 % sudah sesuai dengan target.

Permasalahan :

- Banyaknya penyandang disabilitas, terutama disabilitas berat dan keluarganya yang membutuhkan pendampingan dan dukungan bantuan kebutuhan dasar Ketidakmampuan penyandang disabilitas memahami instruksi dengan baik.

Solusi :

- Mencari pendukung penanganan dan pelayanan dengan pihak lain.
- Pendataan dan pendampingan terhadap penyandang disabilitas terutama Keluarga penyandang disabilitas melalui perangkat desa terdekat .

- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti tercapai 100% sudah sesuai dengan target.

Permasalahan :

- Banyaknya permasalahan sosial anak termasuk ABH, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak dengan HIV/AIDS, anak korban kekerasan fisik mental dan atau perdagangan, Anak Dalam Situasi Rentan dan lainnya perlu mendapatkan penanganan termasuk pada keluarganya.
- Perlindungan anak jumlah yang ditangani lebih banyak dan tidak bisa diprediksi karena tergantung banyak kasus anak yang muncul/dilaporkan

Solusi :

- Memperdayakan tenaga kesejahteraan sosial yang berada di wilayah sebagai pendamping, baik Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti tercapai 95 % belum sesuai dengan target.

Permasalahan :

- Banyaknya lanjut usia terlantar yang perlu penanganan mendesak seperti lansia yang memerlukan tempat tinggal yang layak namun untuk masuk ke panti tidak memenuhi persyaratan karena sudah tidak bisa beraktifitas kehidupan sehari-hari/ Activity of Daily Living (ADL).
- Banyaknya lansia yang terlantar karena keluarga tidak mau mengurus maupun menerima keberadaannya dengan alasan tertentu.
- Masih Adanya lanjut usia terlantar yang belum siap diberikan pelayanan Sosial di Panti Wredha.
- Masih ditemukannya lanjut usia terlantar yang sudah tidak bisa mandiri di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai calon penerima manfaat dalam panti.

Solusi :

- Pendekatan kepada keluarga maupun masyarakat di lingkungannya untuk ikut peduli, dan mau berpartisipasi dalam mengurus lanjut usia terlantar karena permasalahan sosial lanjut usia adalah tanggungjawab bersama.
- Pendekatan kepada Lansia dan lingkungan sekitar untuk memberikan pemahaman tentang fasilitas di dalam Panti Wredha.

- Berusaha semaksimal mungkin mencari panti yang bersedia menerima calon penerima manfaat lanjut usia terlantar tidak mandiri.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti tercapai 100 % sudah sesuai dengan target.

Permasalahan:

- Sering ditemukan gelandangan baru, baik gelandangan psikotik maupun gelandangan non psikotik.
- Belum maksimalnya Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca rawat Inap di RSJD (kembali ke keluarganya) karena tidak adanya pendampingan obat bagi pasien sehingga pasien sering kambuh dan keluarga mengalami kendala dalam pendampingan ODGJ yang menjadi salah satu penyebab pergelandangan.
- Terbatasnya akses penyaluran penerima manfaat ke panti sosial milik instansi lain disebabkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi.
- Belum maksimalnya Kabupaten memanfaatkan media penelusuran identitas gelandangan.
- Belum adanya upaya yang berkesinambungan dan terintegrasi antar pemerintah daerah dalam penanganan permasalahan anak jalanan (Gelandangan Anak) di Indonesia.

Solusi :

- Memanfaatkan sarana dan prasarana alat/media Penelusuran identifikasi Gelandangan seperti :
 - a) Alat Biometrik;
 - b) Aplikasi cari temu Dinas Sosial kabupaten sragen;
 - c) Media Sosial (facebook/instagram, dll);
 - d) Koordinasi Via aplikasi perpesanan (Grup Whatsapp), telepon ke TKSK, perangkat desa kelompok relawan untuk proses penelusuran dan/atau reunifikasi keluarga.
- Memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk pembinaan anak jalanan untuk reunifikasi dengan keluarga.
- Memberikan dukungan, motifasi dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif serta pendampingan pekerja sosial bagi pengemis yang telah dilakukan rehabilitasi sosial di Rumah Singgah.

- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana bagi korban bencana Kab/Kota tercapai 100 %.

Pemasalahan :

- Belum tersedianya data bencana baik waktu, tempat, lokasi dan jumlah korban secara real time.

Solusi :

- Menyusun perencanaan anggaran berdasarkan data empiris (sudah terjadi) bencana tahun tahun sebelumnya
- Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagaimana di halaman berikut adalah :

Tabel 2.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
1.	Meningkatkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang ditangani	Persentase Meningkatnya keberdayaan PPKS	90 %	95,16	105,73	90 %	98,72%	109,64
2	Meningkatnya Keberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	75	75,7	100,93	76%	78,16%	102,84

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 untuk indikator tujuan Meningkatkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang ditangani sebesar 90%, terealisasi 98,72% sedangkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 untuk Meningkatnya Keberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 76% dengan Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 78,16%.

Dari Indikator Sasaran pada Sasaran diatas adalah prosentasi PPKS yang ditangani didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan KRSE
2. Jumlah Orang Terlantar dan kehabisan bekal
3. Jumlah Korban Bencana alam dan non alam
4. Jumlah Penyandang cacat bantuan alat bantu
5. Jumlah Penerima bantuan Korban kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah
6. Jumlah Penerima Bantuan JSLU Terlantar
7. Jumlah Penerima Bantuan UEP bagi Penyandang Cacat
8. Jumlah Penerima Bantuan kepada PPKS

Secara umum capaian indikator pada Tujuan Meningkatkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang di tangani dengan indikator Persentase meningkatnya keberdayaan PPKS pada tahun 2023 total PPKS terdata sebanyak 76.299 orang dengan PPKS Miskin tertangani sebanyak 74.602 Orang dengan sasaran Meningkatnya keberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator sasaran yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani pada tahun 2023 Total PPKS Terdata sebanyak 96.372 orang dengan dan jumlah PPKS yang di tangani sebanyak 74.602 Orang

Keberhasilan dalam penanganan PPKS tidak lepas dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berfungsi untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dalam membantu menangani masalah-masalah PPKS. Adapun PSKS garapan Dinas Sosial Kabupaten Sragen sebagai berikut :

NO	JENIS PSKS	Jumlah
----	------------	--------

1	Pekerja Sosial Profesional	8 Orang
2.	Penyuluh Sosial	4 Orang
3.	Pekerja Sosial Masyarakat	981 Orang
4.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	45 Orang
5.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	15 Panti
6.	Karang Taruna	208 Desa
7.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1 Lembaga
8.	Penyuluh Sosial Masyarakat	15 Orang
9.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	20 Orang
10.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	83 Orang
11.	Dunia Usaha	3 Lembaga
12.	Pendamping PKH	126 Orang

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berorientasi pada tugas pokok dan fungsinya, sehingga program dan tujuan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Sragen tidak terlepas dari rencana program jangka menengah yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan fungsi Dinas Sosial dalam pelayanan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) .

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Sragen, yaitu:

Adapun permasalahan utama Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Sosial di Kabupaten Sragen, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut:

1. Belum adanya konsistensi aturan yang dijadikan acuan penyusunan dokumen perencanaan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi (Penetapan aturan seringkali mundur atau maju)

2. Dokumen perencanaan seringkali kurang mengakomodir potensi yang ada karena tidak di sertai dengan analisis yang sesuai;
3. Laporan Triwulan capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari perangkat daerah seringkali terlambat disampaikan sehingga menghambat kegiatan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan;
4. Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat di tangani dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada;
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional seperti Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial;
6. Form Tanggung Jawan Sosial Sosial (TJSL) seperti Corporate Social Responbility (CSR) yang belum berjalan secara optimal;
7. Belum optimalnya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LK3) dalam mendukung Kota Layak Anak (KLA);
8. Perlunya terobosan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan integrative, dimulai dari Desa;
9. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terkait aspek internal seperti ruang rapat yang kurang layak, lantai yang kurang memadai, kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan ekstra (suku cadang (spare part) sudah tidak diproduksi);
10. Meningkatkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
11. Menurunkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
12. Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
13. Kurangnya sinergisitas dan crosscutting lintas sektoral/ Perangkat Daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan
14. Input data belum terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
15. Masyarakat masih menganggap proses assesment adalah proses untuk mendapatkan bantuan sosial bukan untuk verifikasi;
16. Mental miskin, masyarakat suka dianggap miskin untuk memperoleh bantuan sosial;

17. Adanya Unsur kedekatan dengan perangkat desa sampai tingkat RT (konflik kepentingan);
18. Kemampuan teknis yang di miliki SDM Dinas Sosial Kabupaten Sragen kurang optimal
19. Undang-undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 298 yaitu Belanja Daerah di prioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintah Wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal belum di anggarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen;

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, PGOT dan keterpaduan penanganan PPKS antar pemerintahan dan antar sektor;
- b. Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PPKS lainnya
- c. Masih kurang optimalnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta tuntutan terhadap pelayanan dalam bidang Sosial adalah kurangnya kualitas dan produktivitas SDM, serta tuntutan kompetensi SDM yang terlatih secara teknis dan berdaya saing sebagai dampak dari tuntutan efektifitas serta produktivitas kinerja.

Penetapan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026 tidak dapat di pisahkan dari visi Pembangunan Jangka Panjang yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen 2005-2025. Dengan pertimbangan arah pembangunan, Kondisi, Masalah, tantangan dan isu-isu strategis maka visi kabupaten Sragen 2021-2026 adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) **Misi** Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan Pelayanan Publik berbasis teknologi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Investasi dan ketahanan pangan;
4. Penanganan kemiskinan dan memperkuat kesempatan kerja;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Sebagaimana visi dan misi diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan mendukung pencapaian **di Bidang Pemberdayaan Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Penangan Fakir miskin.**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan Dinas Sosial berkaitan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

a. Tantangan :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas pelayanan guna memastikan ketersediaan Jenis Pelayanan Dasar (hak dasar) pada SPM Sosial Daerah Kabupaten untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Luar Panti:1) Anak Terlantar; 2) Lansia Terlantar; 3) Disabilitas Terlantar; 4) Pengemis & Gelandangan Terlantar; dan 5) Linjamsos pada saat dan setelah Bencana Kabupaten, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Jumlah SDM yang ada di Dinas Sosial saat ini berjumlah 31 orang, sesuai dengan analisis jabatan seharusnya jumlah SDM Dinas Sosial 56 orang. Kegiatan yang ada di Dinas Sosial dapat berjalan karena adanya tenaga non PNS sejumlah 23 orang. Besar harapannya semua pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sragen adalah PNS.

3. Sebagai pelayanan wajib dasar pemerintah daerah, anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sragen masih rendah.
4. Peningkatan sarana prasarana Rumah singgah Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
5. Peningkatan sarana prasarana Graha Inklusi Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
6. Konsekuensi pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Urusan Sosial adalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah serta pembagian kewenangan Kabupaten dalam bidang rehabilitasi adalah Rehabilitasi PPKS Luar Panti, kecuali Eks Napsa dan HIV AIDS.
7. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan memberikan dukungan dan daya ungkit pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada Tujuan 1). Tanpa Kemiskinan; 2). Tanpa Kelaparan; 3).Kehidupan Sehat dan Sejahtera, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
8. Pengelolaan, mengkoordinasikan serta penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan penyusunan kebijakan pembangunan daerah khususnya bidang penanganan kemiskinan, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor13 tahun 2014 tentang Fakir Miskin.

b. Peluang :

1. Sumber Daya Manusia (ASN) yang memiliki kualifikasi Jabatan Struktural, Penyuluh Sosial, Fungsional Umum dan Pranata pada Sekretariat Dinas Sosial Dinas Sosial di Kabupaten Sragen yang masih memungkinkan optimalisasinya dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS sejumlah 76.299 orang
2. SDM PKH sebanyak 121 Orang, Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) sebanyak 2 orang, Koordinator Kabupaten PKH Kabupaten

Sragen sebanyak 1 orang , Tenaga Kontrak Non PNS sebanyak 24 Orang yang ditempatkan di Kabupaten Sragen, yang anggarannya mengikuti kegiatan merupakan potensi untuk memecahkan masalah keterbatasan SDM PNS.

3. Untuk optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga karena adanya forum CSR sebagai sumber anggaran lain yang tidak mengikat untuk mendukung kegiatan/program khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.
4. Keterbatasan sarana prasarana Rumah Singgah telah disikapi dengan Penyediaan anggaran fungsi untuk menjawab tuntutan dinamika persoalan dimasyarakat dalam pelayanan kepada PPKS berperspektif HAM.
5. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan arah, metode dan teknik pekerjaan sosial guna pencapaian target pengurangan jumlah PPKS dalam kerangka penurunan kemiskinan di Jawa Tengah dan penguatan kapasitas dalam rangka peningkatan peran PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.
6. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suasana otonomi daerah menuntut terbangunnya kemitraan strategis dengan OPD lainnya, Kecamatan, Kelurahan/Desa untuk memastikan Negara hadir dalam menyelesaikan permasalahan sosial serta memastikan tidak ada golongan masyarakat atau PPKS yang tidak tertangani.
7. Urusan sosial menjadi urusan wajib pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sragen Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial.
 1. Kelompok Unsur Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 2. Kelompok Unsur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan

pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keuangan.

3. Kelompok Unsur Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

Dalam menyelenggarakan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas :

1. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam menyelenggarakan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :

1. Penyusunan bahan program kerja di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Jaminan Sosial Keluarga.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:

1. Penyusunan bahan program kerja di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Jaminan Sosial Keluarga;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Jaminan Sosial Keluarga;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Jaminan Sosial Keluarga;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Jaminan Sosial Keluarga;
 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Jaminan Sosial Keluarga; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial.

Dalam menyelenggarakan fungsi Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas :

1. Penyusunan bahan program kerja di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial; dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Sragen didukung oleh sumber daya manusia kondisi per 31 Desember 2023, dengan perincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	JABATAN	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		STAF		Non PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-		
2	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	-	-		
3	Kepala Bidang	-	-	3	1	-	-	-	-		
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	-	1	-	-		
5	Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	2	11	-	-		
6	Pelaksana	-	-	-	-	-	-	5	6		
7	Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6
	Jumlah	1	-	3	2	2	12	5	6	18	6

b. Berdasarkan Status Golongan dan Pendidikan

No	JABATAN	SD	SLTP	SLTA	D3	S.1	S.2	JML
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	1	2	3
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	-	1
5	Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	1	7	8	16
6	Pelaksana	-	-	3	-	6	-	9
7	Non PNS	-	-	8	-	15	-	23
	Jumlah	-	-	12	2	29	12	54

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Renja Dinas Sosial disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi, konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, keberpihakan pada kesejahteraan sosial PPKS, peran serta masyarakat, organisasi sosial dan

Dunia Usaha secara aktif, system birokrasi penyelenggaraan sosial yang kuat transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang sosial dalam dokumen Rencana kerja yang memuat urusan wajib yang didukung oleh data dan indikator kinerja terukur, diimplementasikan kedalam pilar nomor 4 (empat) pelayanan kesejahteraan sosial, dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah – masyarakat – dunia usaha serta berorientasi kepda pemulihan sosial psikologis PPKS dan penguatan kapasitas PSKS.

Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dengan merujuk pada program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen lampiran matrik RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang terkait dengan tugas dan fungsi dan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

Dari identifikasi terhadap program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2024 terdapat 6 program 15 kegiatan serta 45 Sub kegiatan yang diusulkan pada tahun 2025 terdapat 7 program 16 kegiatan serta 51 Sub Kegiatan tersebut diusulkan untuk mengimplementasikan pada target dan capaian terhadap visi dan misi Pemerintah Daerah. Dari review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 atau rumusan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 Kabupaten Sragen sebagaimana terdapat pada tabel 2.4 sebagai sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial Kab. Srg				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial Kab. Srg				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial Kab. Srg			14.746.330.320	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial Kab. Srg			14.746.330.320	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase Ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	6.696.021.978	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase Ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	6.696.021.978	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.	7 Dokumen	33.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.	7 Dokumen	33.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	5.061.472.172	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	5.061.472.172	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	5.051.472.172	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	5.051.472.172	
5	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	5 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	5 Dokumen	5.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikerjakan	1 Dokumen	5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikerjakan	1 Dokumen	5.000.000	
7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Laporan	160.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Laporan	160.000.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	13 Unit	473.531.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	13 Unit	473.531.400	
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	385.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	385.000.000	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	88.531.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	88.531.400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Laporan	266.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Laporan	266.000.000	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	161.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	161.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	12 Laporan	696.518.406	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	12 Laporan	696.518.406	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	360.580.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	360.580.000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	335.938.406	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	335.938.406	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) PSKS yang Aktif secara Individu, Keluarga dan Lembaga	100%	580.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) PSKS yang Aktif secara Individu, Keluarga dan Lembaga	100%	580.000.000	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	100 Orang	15.000.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	100 Orang	15.000.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah PSKS (TKSK, Karang Taruna, PSM, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tagana, dll) yang mengikuti Diklat	399 Orang	565.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah PSKS (TKSK, Karang Taruna, PSM, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tagana, dll) yang mengikuti Diklat	399 Orang	565.000.000	
20	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	70.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	70.000.000	
21	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	275.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	275.000.000	
22	Peningkatan kemampuan potensi sumber Kesejahteraan Sosial keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	60 Orang	20.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber Kesejahteraan Sosial keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	60 Orang	20.000.000	
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	139 Lembaga	155.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	139 Lembaga	155.000.000	
24	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Sertifikat	45.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Sertifikat	45.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan	100%	150.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan	100%	150.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Korban Tindak Kekerasan(KTK) dan Pekerja Migran (PM) bermasalah yang di tangani	30 Orang	150.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Korban Tindak Kekerasan(KTK) dan Pekerja Migran (PM) bermasalah yang di tangani	30 Orang	150.000.000	
25	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	150.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	150.000.000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100%	2.048.739.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100%	2.048.739.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Lansia terlantar, anak terlantar, bermasalah	2.802 Orang	1.648.165.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Lansia terlantar, anak terlantar, bermasalah	2.802 Orang	1.648.165.000	
26	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150.000.000	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
27	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Orang	45.000.000	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Orang	45.000.000	
28	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	125.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	125.000.000	
29	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	105.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	105.000.000	
30	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	175.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	175.000.000	
31	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	382 Orang	105.883.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	382 Orang	105.883.000	
32	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	
33	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	303 Orang	142.282.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	303 Orang	142.282.000	
34	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
35	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	345 Orang	540.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	345 Orang	540.000.000	
36	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000	
37	Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	185.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	185.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti	650 Orang	400.574.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti	650 Orang	400.574.000	
38	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	650 Orang	400.574.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	650 Orang	400.574.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	4.951.574.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	4.951.574.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Operasional Bantuan sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), RTLH, Fakir Miskin, Santunan Duka Cita yang masuk DTKS dan jumlah Operator desa/kelurahan yang mengikuti Verifikasi dan validasi data Fakir Miskin, Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai bagi Fakir Miskin, Jumlah SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Jumlah Survei Saraswati, jampersal, RTLH,	5.211 Orang	4.951.574.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Operasional Bantuan sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), RTLH, Fakir Miskin, Santunan Duka Cita yang masuk DTKS dan jumlah Operator desa/kelurahan yang mengikuti Verifikasi dan validasi data Fakir Miskin, Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai bagi Fakir Miskin, Jumlah SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Jumlah Survei Saraswati, jampersal, RTLH,	5.211 Orang	4.951.574.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
			beasiswa bagi Masyarakat Miskin (UPT-PK), Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok, bantuan jaminan hidup kemiskinan absolut desa tuntas kemiskinan					beasiswa bagi Masyarakat Miskin (UPT-PK), Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok, bantuan jaminan hidup kemiskinan absolut desa tuntas kemiskinan			
39	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2.067 Keluarga	854.574.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2.067 Keluarga	854.574.000	
40	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga*	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.976 Orang	3.340.400.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.976 Orang	3.340.400.000	
41	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	168 Orang	756.600.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	168 Orang	756.600.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan	100%	215.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan	100%	215.000.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang ditangani	100%	125.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentase (%) Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang ditangani	100%	125.000.000	
42	Penyediaan Makanan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30.000.000	Penyediaan Makanan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30.000.000	
43	Penyediaan sandang	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	Penyediaan sandang	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
44	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Tempat	10.000.000	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Tempat	10.000.000	
45	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	35.000.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	35.000.000	
46	Pelayanan Dukungan Psikososial	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	25.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	25.000.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Tagana yang mengikuti kegiatan Evakuasi Bencana Alam dan Sosial dan Koordinasi bencana alam dan sosial	40 Orang	90.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Tagana yang mengikuti kegiatan Evakuasi Bencana Alam dan Sosial dan Koordinasi bencana alam dan sosial	40 Orang	90.000.000	
47	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kampung	60.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kampung	60.000.000	
48	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	30.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	30.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentasi (%) TMP yang dikelola (Dirawat)	100%	104.995.342	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial Kab. Srg	Prosentasi (%) TMP yang dikelola (Dirawat)	100%	104.995.342	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah makam terpenuhinya pemeliharaan TMP yang terawat	1 Makam	104.995.342	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah makam terpenuhinya pemeliharaan TMP yang terawat	1 Makam	104.995.342	
50	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	54.995.342	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	54.995.342	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
51	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	50.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kab. Srg	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	50.000.000	
					14.746.330.320					14.746.330.320	

NB: *Subkegiatan yang masuk program stunting sesuai Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk menjadi suatu Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahunnya usulan-usulan kegiatan dalam Renja OPD selain kegiatan yang merupakan penjabaran sesuai tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen juga diperoleh dari program dan usulan dari para pemangku kepentingan ataupun stakeholder Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang dilakukan penjangkaran lewat musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrebang Kabupaten yang difasilitasi oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Sragen.

Adapun realisasi usulan dari Pokok-Pokok Pikiran Dewan disampaikan dalam musrenbang kabupaten dan diperoleh dalam masa reses yang diinput dalam mekanisme tersendiri dalam SIPD, semuanya tertampung pada tabel 2.5 sebagai berikut ini :

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sragen

Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Sragen

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Besaran / Volume	Catatan
			Tolok Ukur	Keluaran		
	Program Perlindungan Jaminan Sosial/Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota/ Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Sragen	Jumlah PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (orang)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	28 PRSE	Pokok-Pokok Pikiran Dewan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

Pembangunan daerah Tahun 2025 Kabupaten Sragen dengan pertimbangan arah pembangunan, kondisi, masalah, tantangan dan isu-isu strategis adalah **“Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”** dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

1. Perwujudan kemandirian ekonomi daerah;
2. Perwujudan layanan investasi yang berkualitas;
3. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah;.
5. Penguatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat;
6. Penguatan Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran;
7. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat;
8. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah menargetkan, tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 4-5 persen pada tahun 2025. Kabupaten Sragen merupakan salah satu wilayah zona merah kemiskinan dengan tingkat kemiskinan melebihi tingkat kemiskinan provinsi dan nasional. Kinerja penurunan Angka Kemiskinan dari tahun 2022 (12,94%) ke 2023 (12,87%) sebesar 0,07% cukup baik dibandingkan dengan 5 Kabupaten Lain di Solo Raya, dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan pada angka 10,58% dan penanganan kemiskinan ekstrim pada 0-0,5% secara *cross cutting*.
2. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Penurunan angka pengangguran.

Untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat tetapi kerja sama juga dilakukan oleh pemerintah daerah.

Mengacu dari Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan isu strategis adalah penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Apabila dikaitkan dengan isu strategis kebijakan nasional dalam kerangka sinergitas dan sinkronisasi perkembangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/ Kota, maka secara tidak langsung dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025 harus menyelaraskan dengan perkembangan skala prioritas Pemerintah Pusat. Dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang terdiri 7 program 16 kegiatan serta 51 Sub Kegiatan telah secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan isu Meningkatkan taraf hidup PPKS, KAT untuk pemenuhan kebutuhan dasar, memulihkan kondisi sosial/psikologi dan peningkatan fungsi sosial kehidupan bagi PPKS, Meningkatnya kemandirian bagi penyandang Disabilitas, dan Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan anak terlantar.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam urusan sosial sesuai dengan RKPD yang meliputi:

1. Persentase PSKS yang Aktif secara Individu, Keluarga dan Lembaga.
2. Persentase KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan.
3. Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti panti.
4. Persentase Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan.
5. Persentase TMP yang dikelola (Dirawat).

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025

“Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”.

Dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 :

1. Perwujudan kemandirian ekonomi daerah dengan strategi peningkatan produksi dan produktivitas perekonomian daerah dan penguatan upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
2. Perwujudan layanan investasi yang berkualitas dengan strategi peningkatan iklim usaha yang berdaya saing;
3. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah dengan strategi peningkatan penyediaan infrastruktur wilayah;

4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantaban kapasitas fiskal daerah, dengan strategi pelaksanaan transformasi kelembagaan dan pelayanan publik;
5. Penguatan kualitas SDM dan kualitas hidup Masyarakat, dengan strategi peningkatan mutu pelayanan pendidikan, Kesehatan, peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak;
6. Penguatan percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.
7. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat dengan strategi pencapaian akses, distribusi, keamanan, dan keanekaragaman pangan serta penguatan cadangan.
8. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan strategi peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, dimana pada Tahun 2025 terdapat 7 program 16 kegiatan serta 51 Sub kegiatan, yang secara umum mencakup tujuan sasaran sebagai berikut :

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023
			Target
1.	Meningkatkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang ditangani	Persentase Meningkatnya keberdayaan PPKS	90 %
2	Meningkatnya Keberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	76%

Mengacu pada indikator kinerja dan target capaian Program / Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang meliputi pelayanan kesejahteraan sosial, dalam indikator kinerja di bidang sosial yaitu persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang ditangani, dengan

sasaran persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 diarahkan pada penanganan 26 Jenis PPKS Tahun 2023 sebanyak 84,657 jiwa di Kabupaten Sragen dan penguatan kapasitas 10 jenis PSKS, maka tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengarah kepada 2 (dua) hal pokok yakni :

1. Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Sasaran dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah menurunkan populasi PMKS dan meningkatkan peran PSKS dalam UKS, melalui :

1. Penyediaan *basic life access* yang diarahkan untuk Pemenuhan kebutuhan dasar PPKS
2. Penguatan kelembagaan, pengelolaan basis data terpadu, basis spasial, berbasis komunitas, pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan.

3.3. Strategi dan Kebijakan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program- program indikatif untuk mewujudkan tujuan Dinas Sosial, adapun strategi Dinas Sosial Kabupaten Sragen yaitu Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :

1. Mengoptimalkan pemberdayaan sosial;
2. Mengoptimalkan rehabilitasi sosial;
3. Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial;
4. Mengoptimalkan penanganan bencana;
5. Meningkatkan pengelolaan taman makam pahlawan.

Kebijakan adalah arah yang di tempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sragen di arahkan kepada :

1. Program Pemberdayaan Sosial yang di fokuskan pada PSKS yang Aktif secara Individu, Keluarga dan Lembaga;

2. Program Penanganan Warga Negara Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang difokuskan pada KTK dan PM bermasalah yang mendapatkan penanganan;
3. Program Rehabilitasi Sosial yang di fokuskan pada PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang di fokuskan pada PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana yang di fokuskan pada Korban Bencana Alam dan bencana Sosial yang mendapatkan penanganan;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang di fokuskan pada TMP yang dikelola (Dirawat).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

4.1. Rencana Kerja

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dikenal adanya program, kegiatan dan sub kegiatan. Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, sementara sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program, dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025, berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif), selanjutnya dijadikan acuan

bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD).

Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif tahun 2025 sudah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau sudah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri terakhir, Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dasar penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan turunan dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan target capaian utama adalah terwujudnya kesejahteraan melalui Pembangunan Bidang Sosial. Disamping mempertimbangkan beberapa target / capaian Pemerintah Pusat, Propinsi dimana salah satunya adalah isu pengurangan jumlah penduduk miskin.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka terdapat 2 (dua) hal pokok yang permasalahan yang menjadi perhatian yakni :

1. Penyediaan Pelayanan Sosial Dasar yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar PPKS, terkait :
 - a. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial PPKS sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya Rumah Singgah, Graha Inklusi dan PKSAI;
 - b. Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS, khususnya yang non produktif dan korban bencana;
 - c. Pemberdayaan sosial bagi PPKS agar mandiri dan berfungsi sosial wajar;
 - d. Penguatan peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial;

- e. Perlunya dukungan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
 - f. Perlunya Sinkronisasi Pelayanan Sosial Tingkat Pusat Provinsi dan Daerah.
2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang meliputi :
- a. Peningkatan kualitas verifikasi dan validasi data kemiskinan dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten;
 - b. Sinkronisasi data kemiskinan di Kabupaten dengan Kementerian Sosial;

4.2. Dana Indikatif

Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dan prakiraan maju tahun anggaran 2026 sesuai pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, atau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri terakhir, Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			Target
1																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										14.746.330.320	15.449.500.000	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6.696.021.978	6.850.500.000	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah										33.500.000	43.000.000	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			10.000.000	15.000.000	
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			5.000.000	8.000.000	
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			18.500.000	20.000.000	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5.061.472.172	5.150.000.000	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang			5.051.472.172	5.150.00.000	
1	06	01	2.02	0002	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	5 Dokumen			5.000.000	6.000.000	
1	06	01	2.02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen			5.000.000	6.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target		
1	06	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											5.000.000	6.000.000
1	06	01	2.03	0001	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			5.000.000	6.000.000	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											160.000.000	188.500.000
1	06	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			5.000.000	6.000.000	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			15.000.000	17.500.000	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			25.000.000	30.000.000	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			15.000.000	15.000.000	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			100.000.000	120.000.000	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											473.531.400	380.000.00
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			385.000.000	285.000.000	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit			88.531.400	95.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										266.000.000	285.000.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			90.000.000	100.000.000
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			15.000.000	20.000.000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			161.000.000	165.000.000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										696.518.406	785.000.000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit			360.580.000	385.000.000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.		Kab. Sragen			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			335.938.406	400.000.000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										580.000.000	645.000.000
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota										15.000.000	20.000.000
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen			15.000.000	20.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									565.000.000	625.000.000	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang			70.000.000	80.000.000
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang			275.000.000	295.000.000
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan kemampuan potensi sumber Kesejahteraan Sosial keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	60 Orang			20.000.000	25.000.000
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Lembaga			155.000.000	175.000.000
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Sertifikat			45.000.000	50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN										150.000.000	160.000.000
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										150.000.000	160.000.000
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	30 Orang			150.000.000	160.000.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										2.048.739.000	2.295.000.000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										1.648.165.000	1.885.000.000
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang			150.000.000	175.000.000
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Orang			45.000.000	50.000.000
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang			125.000.000	135.000.000
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang			105.000.000	120.000.000
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang			175.000.000	285.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	382 Orang			105.883.000	120.000.000
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Percepatan penanganan kemiskinan dan penganggura		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			15.000.000	20.000.000
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang			142.282.000	150.000.000
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang			50.000.000	55.000.000
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	345 Orang			540.000.000	560.000.000
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang			10.000.000	15.000.000
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang			185.000.000	200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target		
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										400.574.000	410.000.000	
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	650 Orang			400.574.000	410.000.000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										4.951.574.000		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										4.951.574.000	5.104.000.000	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	20.67 Keluarga			854.574.000	954.000.000	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga*	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.976 Orang			3.340.400.000	3.350.000.000	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	168 Orang			756.600.000	800.000.000	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA										215.000.000	260.000.000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										125.000.000	150.000.000	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang			30.000.000	35.000.000	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan sandang	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang			25.000.000	30.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target		
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Tempat			10.000.000	15.000.000
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang			35.000.000	40.000.000
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		150 Orang			25.000.000	30.000.000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										90.000.000	110.000.000	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Kampung g			60.000.000	75.000.000
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		40 Orang			30.000.000	35.000.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										104.995.342	135.000.000	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										104.995.342	135.000.000	
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Makam			54.995.342	75.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	Tolak Ukur	Target	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		Kab. Sragen			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam			50.000.000	60.000.000
TOTAL															14.746.330.320	15.449.500.000

NB: *Subkegiatan yang masuk program stunting sesuai Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021

BAB V

PENUTUP

Mengacu pada usulan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 terdapat 7 program dan 16 kegiatan serta 51 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 14.746.330.320,- (Empat Belas Milyard Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), yang sudah disesuaikan dengan pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri terakhir, Nomor : 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Sosial Kabupaten Sragen pada tahun 2025.

Dengan disusunnya rencana kerja setiap tahun dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana dan sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi

Maka usulan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang berhasil dirumuskan dalam dokumen ini mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi jajaran Dinas Sosial Kabupaten Sragen pada urusan sosial periode Tahun 2021-2026.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran

pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 dalam pencapaian kegiatan untuk setiap tahun anggaran diharapkan dapat mempunyai nilai operasional bagi perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

Untuk pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 agar memenuhi harapan sehingga selaras antara rancangan awal dan analisis kebutuhan perlu disusun :

- a. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen diturunkan dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, yang masuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.
- b. Renja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat dikritisi, dievaluasi dan disempurnakan untuk perkembangan dimasa mendatang.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan yang akan datang.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN



dr. FINURIL HIDAYATI, M.P.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19750414 200501 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS SOSIAL

Jl. RA. Kartini Nomor 8, Sragen, Jawa Tengah 5712
Telp (0271) 891043 Laman dinsos.sragenkab.go.id, Pos-el dinsos.sragen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 400.9 / 1641 / 09 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 5).
8. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana di maksud dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
- KEDUA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
 2. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;

3. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
4. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
5. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Tahun 2025 tepat waktu;
7. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen selaku Pengguna Anggaran

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana di maksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4 Juli 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN



FINURIL HIDAYATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. BUPATI Sragen;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
4. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 400.9 / 1641 / 09 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	dr. Finuril Hidayati, M.PH.	Kepala Dinas Sosial	Penanggungjawab
2.	Suharti, SKM, M.Kes.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Arin Dwi Purwantini, ST, MM	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Drs. Catur Edi Meiyanto, MM	Kabid. Pemberdayaan Sosial	Anggota
5.	Kusuma Adi Surya Pamungkas, SE, MM.	Kabid. Rehabilitasi Sosial	Anggota
6.	Drs. Sumarno, M.Si	Kabid. Perlindungan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Ila Aulia Rahmah, A,Md	Pranata Komputer Terampil Dinas Sosial	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN



FINURIL HIDAYATI